

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

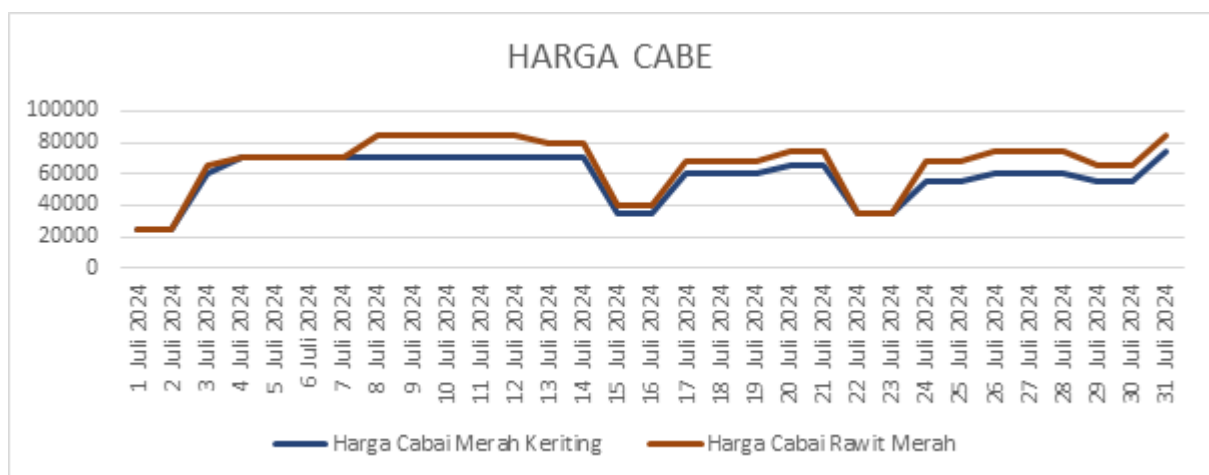
Pada Agustus 2024 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Kabupaten Maluku Tengah sebesar 1,38 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,11.

Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,64 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,92 persen; kelompok kesehatan sebesar 11,82 persen; kelompok transportasi sebesar 1,39 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,95 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 12,45 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 13,18 persen.

Tingkat deflasi month to month (m-to-m) Kabupaten Maluku Tengah bulan Agustus 2024 sebesar 0,76 persen dan tingkat deflasi year to date (y-to-d) Kabupaten Maluku Tengah bulan Agustus 2024 sebesar 1,07 persen.

Trend fluktuasi harga komoditi yang bergejolak penyebab inflasi

1. Cabe Merah dan Cabe Keriting



2. Trend fluktuasi harga ikan penyumbang inflasi

Harga Cabe mengalami fluktuasi yang cukup signifikan di pengaruhi oleh jumlah pasokan dari daerah sentra produksi yang berada di sekitar kota masohi yang kurang disebabkan karena mulai memasuki musim penghujan sehingga cabe sebagian besar dipasok dari daerah kobisonta hal ini menyebabkan tingginya harga cabe khususnya cabe rawit dikarenakan biaya transportasi yang cukup tinggi, namun untuk mengimbangi harga cabe Pemda Malteng lewat Tim TPID melakukan Pasar murah dan subsidi ke pedagang cabe

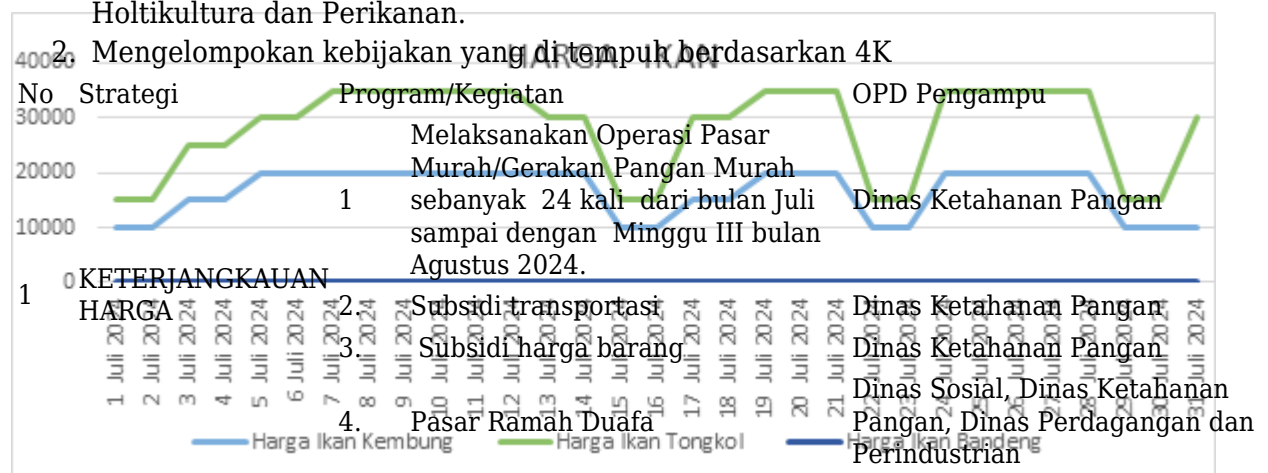
2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

1. Perbedaan harga yang cukup tinggi dari tempat produksi ke tempat penjualan
2. Perubahan Cuaca yang tidak bisa di prediksi.
3. Belum ada peraturan Nilai Tukar Petani (NTP) tingkat Kabupaten dan harga penjualan tertinggi
4. Gejolak harga pangan yang tiba-tiba

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah melakukan MoU Kerjasama Antar Daerah Komoditas Perdagangan dengan Kabupaten Maluku Tenggara dan Penandatanganan Kesepakatan Bersama (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dan Kota Ambon dan Perjanjian Kerjasama (PKS) tentang Distribusi Tanaman Pangan dan Holtikultura dan Perikanan.

2. Mengelompokkan kebijakan yang ditempuh berdasarkan 4K



2	KETERSEDIAAN PASOKAN	a.	Panen padi seluas 2.111,94 ha dengan total produksi padi sebanyak 1.289 ton Dengan produksi sebanyak ini mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Maluku Tengah selama 15 hari kedepan. Untuk kekurangannya dapat dicapai dengan pasokan beras dari Bulog dan distributor lainnya. Konsumsi masyarakat Kabupaten Maluku Tengah per hari sebanyak 88,9 ton.	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
		b.	Pasokan beras lain terutama beras SPHP, Gula konsumsi dan Minyak Kita Melalui kerjasama dengan BULOG dan ID Food lainnya.	Bulog, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		c.	Memfasilitasi 170 pedagang sebagai mitra Bulog	Dinas Ketahanan Pangan
		d.	Panen cabe rawit di Kecamatan Amahai dan cabe keriting di kecamatan Seram Utara Timur Seti	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
		e.	Gerakan menanam padi, telah panen raya di bulan Juli dan Agustus 2024;	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
		i.	Gerakan menanam cabe di pekarangan kantor, pekarangan sekolah dan pekarangan rumah masyarakat sesuai Surat Edaran Bupati Maluku Tengah Nomor 526/06/SE/2024 tentang Gerakan Menanan Cabe di Pekarangan yang telah dilaunching pada tanggal 2 Februari 2024;	Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	KELANCARAN DISTRIBUSI	a.	Subsidi biaya transportasi dari APBD	Dinas Perhubungan dan Dinas Ketahanan Pangan
		b.	Kerjasama antar Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.	Sekretariat Daerah, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		c.	Kerjasama dengan Kota Ambon di bidang komoditi unggulan daerah	Sekretariat Daerah, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		d.	Kerjasama dengan Kabupaten Maluku Tenggara,	Sekretariat Daerah, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		e.	Kerjasama dengan Bulog	Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		g.	Kerjasama RMP dan RMU di Kecamatan Seram Utara.	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

4	KOMUNIKASI EFEKTIF	a.	Melakukan High Level Meeting	TPID
		b.	Rapat Koordinasi dengan TPID Pusat setiap hari Senin	TPID
		c.	Rapat Koordinasi dengan TPID Provinsi Maluku	TPID
		d.	Rapat Koordinasi TPID Kabupaten setiap Senin	TPID

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Kebijakan yang di tempuh sudah menyelesaikan permasalahan Inflasi

strategi kebijakan 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif) dilakukan melalui beberapa hal. Pertama, stabilisasi harga untuk mengatasi kenaikan harga dalam jangka pendek melalui penyaluran SPHP, bantuan pangan, dan gerakan pangan murah, telah berhasil menahan kenaikan harga pangan lebih tinggi

Kendala yang di hadapi

1. Kondisi permasalahan yang sering dihadapi adalah perubahan harga komoditi lokal dan cuaca, seperti hujan dan lain2
2. Kebijakan pasar regional yang sering sulit di atasi, seperti kenaikan harga yang dinaikan oleh pedagang

Dampak dari kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Maluku tengah berupa daya beli masyarakat cukup tinggi di karenakan kondisi harga barang yang dapat di jangkau oleh masyarakat.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Penerapan strategi **4K** dalam pengendalian inflasi adalah pendekatan yang melibatkan empat elemen utama, yaitu **Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif**. Setiap elemen ini saling berkaitan untuk memastikan inflasi tetap terkendali, baik di tingkat nasional maupun daerah. Berikut adalah rekomendasi penerapan dari setiap elemen 4K:

1. Keterjangkauan Harga

- **Tujuan:** Memastikan harga barang dan jasa, terutama kebutuhan pokok, tetap terjangkau oleh masyarakat.
- **Rekomendasi Penerapan:**
 - **Subsidi dan Stabilisasi Harga:** Pemerintah dapat memberikan subsidi untuk barang-barang kebutuhan pokok yang kritis seperti beras, gula, minyak goreng, dan bahan bakar. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat cadangan pangan nasional dan daerah untuk menstabilkan harga ketika terjadi lonjakan permintaan.
 - **Operasi Pasar:** Secara rutin, pemerintah dapat melakukan operasi pasar terutama saat harga-harga melonjak di waktu-waktu tertentu seperti menjelang hari raya. Ini penting untuk menstabilkan harga dan memastikan ketersediaan barang di masyarakat.
 - **Penguatan Peran Bulog dan Lembaga Pengendali Harga:** Bulog dan lembaga

sejenisnya perlu diperkuat untuk menjalankan fungsi sebagai stabilisator harga pangan dan barang-barang penting lainnya.

2. Ketersediaan Pasokan

- **Tujuan:** Menjamin ketersediaan pasokan barang terutama pangan di pasar, baik di pusat maupun di daerah.
- **Rekomendasi Penerapan:**
 - **Penguatan Produksi Lokal:** Pemerintah daerah perlu fokus pada penguatan sektor pertanian dan industri lokal agar dapat mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar daerah atau impor. Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan insentif bagi petani, nelayan, dan pelaku industri lokal.
 - **Penyediaan Cadangan Pangan Daerah:** Setiap daerah sebaiknya memiliki cadangan pangan strategis yang dikelola secara baik untuk menghadapi situasi darurat atau krisis, seperti bencana alam atau gangguan cuaca yang mempengaruhi produksi pangan.
 - **Diversifikasi Sumber Pasokan:** Untuk mengurangi risiko dari fluktuasi harga dan keterbatasan pasokan dari satu sumber, diversifikasi sumber pemasok baik di dalam maupun luar negeri sangat penting. Dengan demikian, ketergantungan pada satu wilayah atau satu komoditas bisa dihindari.

3. Kelancaran Distribusi

- **Tujuan:** Menjamin distribusi barang dari produsen hingga konsumen berjalan lancar dan efisien, sehingga harga tidak melonjak karena hambatan distribusi.
- **Rekomendasi Penerapan:**
 - **Perbaikan Infrastruktur Transportasi:** Pemerintah perlu meningkatkan infrastruktur jalan, pelabuhan, dan logistik di daerah-daerah penghasil dan konsumen. Ini akan menurunkan biaya transportasi dan distribusi yang biasanya menyebabkan kenaikan harga di daerah terpencil.
 - **Pengurangan Hambatan Logistik dan Birokrasi:** Menyederhanakan regulasi dan birokrasi terkait distribusi barang, terutama untuk barang kebutuhan pokok. Ini termasuk mempermudah proses perizinan distribusi antar daerah dan mengurangi pungutan liar di jalur distribusi.
 - **Penguatan Sistem Logistik Daerah:** Setiap daerah perlu memiliki sistem logistik yang efisien dan terintegrasi dengan sistem nasional untuk memastikan distribusi barang berjalan lancar. Penggunaan teknologi informasi dalam monitoring dan pengelolaan logistik dapat meningkatkan efisiensi.

4. Komunikasi yang Efektif

- **Tujuan:** Menciptakan komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat terkait informasi harga, ketersediaan barang, dan kebijakan pengendalian inflasi.
- **Rekomendasi Penerapan:**
 - **Transparansi Informasi Harga dan Pasokan:** Pemerintah perlu menyediakan informasi yang akurat dan terkini tentang harga kebutuhan pokok serta ketersediaan pasokan, baik melalui media massa, media sosial, atau aplikasi daring. Hal ini membantu menghindari spekulasi yang dapat memicu kepanikan dan kenaikan harga.
 - **Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Inflasi:** Setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat maupun daerah harus disosialisasikan secara jelas kepada masyarakat agar mereka mengerti langkah-langkah yang dilakukan. Misalnya, ketika dilakukan operasi pasar atau penerapan subsidi, masyarakat harus tahu dampaknya terhadap mereka.
 - **Edukasi Masyarakat tentang Inflasi:** Mengedukasi masyarakat tentang faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi dan bagaimana cara menghadapi kenaikan

harga. Ini termasuk memberikan pemahaman tentang pentingnya tidak melakukan pembelian berlebihan (panic buying) yang bisa memicu inflasi lebih lanjut.

Implementasi dan Monitoring

- **Kerja Sama Antarlembaga:** Keberhasilan strategi 4K memerlukan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bulog, dan pelaku industri. Sistem monitoring terpadu juga perlu diterapkan untuk memastikan setiap langkah dalam strategi 4K terlaksana dengan baik dan efektif.
- **Monitoring Berkala dan Evaluasi:** Pemerintah harus terus memantau perkembangan harga dan inflasi, serta mengevaluasi kebijakan yang telah diterapkan untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tetap relevan dan efektif dalam situasi yang dinamis.

Dengan mengimplementasikan strategi 4K ini secara konsisten, pemerintah dapat lebih efektif dalam mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas harga di tingkat nasional dan daerah.